

**EVALUASI  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TRIWULAN IV  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DINSOS PPKB PPPA KABUPATEN MAGELANG**



**DINSOS PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG  
2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) merupakan bagian dari rangkaian dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dinsos PPKB PPPA sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan 3 urusan yang menjadi tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan tersebut berjalan maka diperlukan evaluasi terhadap rencana kerja yang telah disusun dan dilaksanakan.

### B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 052.12/1301/24/2025 tentang Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2025 Triwulan IV.

#### C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tersusunnya dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2025 Triwulan I.
- b. Mengetahui capaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD

BAB II  
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINSOS PPKB PPPA TAHUN 2025  
TRIWULAN IV

A. TUJUAN DAN SASARAN DINSOS PPKB PPPA

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinsos PPKB PPPA 2025-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga
- c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

2. Sasaran

- a. Meningkatnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana

B. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Rencana Kerja tahun 2025 Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang mengusulkan 3 urusan yang terdiri dari 12 Program, 31 Kegiatan, dan 67 Sub Kegiatan. Adapun rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1****Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
2. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Pemberian Layanan Rujukan
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang
		Pemberian Layanan Rujukan
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
	Pengelolaan Data	Pendataan Fakir Miskin

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Pelayanan Dukungan Psikososial
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
7. Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
9. Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<p>Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p> <p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>
	<p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p> <p>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas KB/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p> <p>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>
	<p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi</p>	<p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di</p>

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Kampung Keluarga Berkualitas
	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA).
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

### C. KESEUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM RENSTRA DINSOS PPKB PPPA, RENJA 2025, DAN APBD 2025

Secara umum program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2026 telah sesuai dengan Renja 2025 dan APBD 2025. Namun dalam beberapa hal terdapat penambahan maupun pengurangan kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD 2025.

Adanya penambahan kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD dilandasi adanya kebijakan pengalokasian DAK yang sebelumnya belum dipetakan di dalam Renstra. Selain itu terdapat pengurangan kegiatan dan sub kegiatan yang sebelumnya telah terdapat dalam Renstra maupun Renja, dimana sebelumnya telah dipetakan sebagai sub kegiatan dengan alokasi DAK, namun dalam APBD sub kegiatan tersebut harus dihapus karena tidak mendapatkan alokasi DAK.

Untuk melihat secara lebih rinci kesesuaian antara Renstra, Renja, dan APBD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2026, Renja Tahun 2025, dan APBD Tahun 2025**

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Kegiatan:	Kegiatan:	Kegiatan:	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyelenggaraan rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	
Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	
Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	
Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pemberian layanan rujukan	Pemberian layanan rujukan	Pemberian layanan rujukan	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	
Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
<b>PROGRAM PEREMPUNAN PERLINDUNGAN</b>	<b>PROGRAM PEREMPUNAN PERLINDUNGAN</b>	<b>PROGRAM PEREMPUNAN PERLINDUNGAN</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENSTRA	RENJA	APBD	KETERANGAN
		<b>Kegiatan:</b>	
		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Muncul Kegiatan baru karena adanya kebijakan DAK</b>
		Sub Kegiatan:	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Muncul Sub Kegiatan baru karena adanya Kebijakan DAK
		<b>Kegiatan:</b>	
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Muncul Kegiatan baru karena adanya kebijakan DAK</b>
		Sub Kegiatan:	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Muncul Sub Kegiatan baru karena adanya Kebijakan DAK
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
		<b>Kegiatan:</b>	
		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Muncul Kegiatan baru karena adanya kebijakan DAK</b>
		Sub Kegiatan:	
		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Muncul Sub Kegiatan baru karena adanya Kebijakan DAK
		<b>Kegiatan:</b>	
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Muncul Kegiatan baru karena adanya kebijakan DAK</b>
		Sub Kegiatan:	
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan	Muncul Sub Kegiatan baru

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
		Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	karena adanya Kebijakan DAK
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	-	Sub Kegiatan hilang dalam APBD karena tidak mendapat alokasi dari DAK
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Muncul Sub Kegiatan baru karena adanya kebijakan DAK
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	Sub Kegiatan hilang dalam APBD karena tidak mendapat alokasi dari DAK

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Tngkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Tngkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Tngkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	Sub Kegiatan hilang dalam APBD karena tidak mendapat alokasi dari DAK
Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB	Pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB	
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Muncul Sub Kegiatan baru karena adanya kebijakan DAK
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	Sub Kegiatan hilang dalam Renja dan APBD karena tidak mendapat alokasi dari DAK
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	<b>Kegiatan:</b>	
<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan:	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	

<b>RENSTRA</b>	<b>RENJA</b>	<b>APBD</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

#### D. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria atas pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan diberlakukan nilai dan makna sebagai berikut:

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, baik capaian kinerja maupun realisasi anggaran Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025 masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Total anggaran perubahan Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp.40.127.975.827,-. Pada Triwulan IV tercapai realisasi sebesar Rp. 37.954.566.632,- atau sebesar 94,58%, dengan ketercapaian realisasi kinerja sebesar 99,70%. Capaian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.423.796.802,- (95,63%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 397.665.688 (92,45%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.643.340.849,- (58,91%) dan capaian kinerja sebesar 96,48%.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.658.504.922,- (97,29%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

5. Program Penanganan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.019.611,- (99,48%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.238.745,- (91,99%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.583.742,- (61,16%) dan capaian kinerja sebesar 100%
8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.697.219,- (90,80%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.382.562,- (70,52%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
10. Program Pengendalian Penduduk dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 651.346.110,- (99,36%) dan capaian kinerja sebesar 99,94%.
11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.187.418.750,- (98,43%) dan capaian kinerja sebesar 100%.
12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.848.571.632,- (99,68%) dan capaian kinerja sebesar 100%.

Terkait dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran secara lebih detail dapat dicermati dalam Form A, Form B, dan Form C pada lampiran laporan ini.

#### E. FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA

1. Adanya komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau rencana pelaksanaan yang telah disusun.

## F. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

1. Dalam Program Rehabilitasi Sosial khususnya dalam Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial realisasi anggaran adalah sebesar 43,15%, hal ini disebabkan adanya kebijakan baru terkait pemberian bansos yang harus masuk dalam kriteria desil 1 dan desil 2 DTSEN, sehingga terdapat beberapa calon penerima bansos yang gagal mendapatkan bansos karena tidak masuk dalam kriteria desil 1 dan desil 2 DTSEN.
2. Capaian realisasi anggaran rendah dalam sub kegiatan yang memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan korban kekerasan dikarenakan realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan. Sehingga meskipun capaian kinerja mencapai 100%, namun realisasi anggaran relatif rendah. Sub kegiatan tersebut yaitu:
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (50,09%)
  - b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (64,63%)
3. Terdapat beberapa capaian kinerja Program yang tidak tercapai 100%, yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), masing-masing memiliki kendala sebagai berikut:
  - a. Program Rehabilitasi Sosial (94,48%), tidak tercapai 100% karena anggaran untuk pemberian bansos alat bantu disabilitas mengalami pengurangan, serta bansos terencana yang memiliki realisasi tidak sesuai target karena adanya perubahan kebijakan penerima bansos yang harus masuk kriteria desil 1 dan desil 2 DTSEN.
  - b. Program Pengendalian Penduduk (99,94%), tidak tercapai 100% dikarenakan masih tingginya angka pernikahan dini, sehingga capaian indikator usia kawin pertama di Kabupaten Magelang masih dibawah target.
  - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (99,93%), tidak dapat tercapai 100% karena capaian peserta KB MKJP yang masih dibawah target. Hal ini dapat disebabkan oleh dua

faktor, pertama belum tingginya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program KB, dan kedua adalah adanya kemungkinan adanya peserta KB MKJP mandiri yang tidak tercatat dalam rekap data peserta KB.

### BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja Dinsos PPKB PPPA tahun 2025 secara umum telah terealisasi dengan predikat sangat tinggi. Namun demikian masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum dapat mencapai target. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama agar pelaksanaan kinerja kedepan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Untuk mencapai kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan diperlukan perencanaan yang lebih baik serta komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu diperlukan kedisiplinan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah disusun.

Dalam rangka memperlancar jalannya program dan kegiatan kedepannya diperlukan pula koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan lintas sektor terkait, sehingga diperoleh kesepahaman dalam menjalankan program dan kegiatan. Kuatnya koordinasi dan kolaborasi diharapkan dapat memperlancar program dan kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan.

Kota Mungkid, 5 Januari 2026

Kepala Dinsos PPKB PPPA  
Kabupaten Magelang



Bela Pinarsi, SH, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670120 198703 2 001

Formulir A  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD

Indikator dan target kinerja PD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Laku (2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.			
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16		
1	Meningkatnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja, OPD, dan keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	7.105.375.117	100	%	7.762.720.101	21,18	%	1.781.532.362	30	%	1.950.086.472	31	%	1.781.873.888	18	%	1.910.304.080	100	%	7.423.796.802	100,00	95,63	Dinsos PPKB PPPA
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	%			7.105.375.117	100	%		35,00	%		30	%	0	22	%		13	%	1.910.304.080	100	%		100,00		
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	32	dokumen	27	dokumen	12.280.000	32	dokumen	16.900.130	11	dokumen	9.300.037	6	dokumen	3.750.000	8	dokumen	0	7	dokumen	3.628.350	32	dokumen	16.678.387	100,00	98,69	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	2	dokumen	6.513.700	5	dokumen	9.350.545	2	dokumen	9.300.037	0	dokumen	0	3	dokumen	0	0	dokumen	0	5	dokumen	9.300.037	100,00	99,46	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27	Laporan	25	laporan	5.766.300	27	laporan	7.549.585	9	laporan	0	6	laporan	3.750.000	6	laporan	0	6	laporan	3.628.350	27	laporan	7.378.350	100,00	97,73	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah administrasi umum yang tersusun	1	dokumen			118.565.072	2	dokumen	75.192.276	2	dokumen	14.070.000	2	dokumen	13.424.710	2	dokumen		2	dokumen	30.842.400	2	dokumen	74.883.260	100,00	99,59	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			423	laporan	118.565.072	100	laporan	75.192.276	5	laporan	14.070.000	50	laporan	13.424.710	9	laporan		36	laporan	30.842.400	100	laporan	74.883.260	100,00	99,59	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	8	Sub Kegiatan	8	sub kegiatan	98.007.210	2	Dokumen	158.972.084	2	sub kegiatan	26.436.550	2	sub kegiatan	14.594.416	2	sub kegiatan		2	sub kegiatan	72.351.291	2	sub kegiatan	129.792.724	100,00	81,64	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	laporan	43.604.720	12	Laporan	37.410.884	3	laporan	11.780.384	6	laporan	0	0	laporan		3	laporan	25.315.844	12	laporan	37.096.228	100,00	99,16	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			142	laporan	54.402.490	132	Laporan	121.561.200	18	laporan	14.656.166	78	laporan	14.594.416	14	laporan		22	laporan	47.035.447	132	laporan	92.696.496	100,00	76,26	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	5	jenis	244.200.000	11	Jenis	210.530.966	0	jenis	0	10	jenis	125.500.000	1	jenis		0	0	jenis	83.900.000	11	jenis	209.400.000	100,00	99,46	Dinsos PPKB PPPA	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			39	unit	74.900.000	2	Unit	29.200.000	0	unit	0	2	unit	29.200.000	0	unit		0	unit	0	2	unit	29.200.000	100,00	100,00	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10	0	169.300.000	7	Unit	181.330.966	0	unit	0	5	unit	96.300.000	2	unit		0	unit	83.900.000	7	unit	180.200.000	100,00	99,38	
			Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	8	Sub Kegiatan	8	sub kegiatan	760.267.521	3	dokumen	1.416.179.365	3	sub kegiatan	78.308.252	3	sub kegiatan	182.243.606	3	sub kegiatan		3	sub kegiatan	540.086.866	3	sub kegiatan	1.353.139.746	100,00	95,55	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			123	unit	388.519.456	125	Unit	436.633.885	40	unit	37.981.700	30	unit	91.241.362	35	unit		20	unit	183.826.457	125	unit	390.176.619	100,00	89,36	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			24	unit	25.000.000	5	Unit	20.000.000	4	unit	0	2	unit	5.820.000	3	unit		4	unit	8.379.500	5	unit	19.999.500	100,00	100,00	Dinsos PPKB PPPA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	unit	346.748.065	3	Unit	959.545.480	3	unit	40.326.552	3	unit	85.182.244	3	unit		3	unit	347.880.909	3	unit	942.963.627	100,00	98,27	Dinsos PPKB PPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Laku (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	24	Kegiatan	27	kegiatan	5.765.282.117	31	Kegiatan	5.800.203.380	29	kegiatan	1.624.913.743	31	kegiatan	1.594.265.500	31	kegiatan	1.180.108.009	31	kegiatan	1.155.913.055	31	kegiatan	5.555.200.307	100,00	95,78					Dinsos PPKB PPPA			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	36	org/bulan	5.704.642.146	44	Orang/ Bulan	5.760.643.609	44	org/bulan	1.618.728.443	44	org/bulan	1.581.465.500	44	org/bulan	1.169.758.009	44	org/bulan	1.145.704.483	44	org/bulan	5.515.656.435	100,00	95,75					Dinsos PPKB PPPA			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			13	dokumen	60.639.971	12	Dokumen	39.559.771	3	dokumen	6.185.300	3	dokumen	12.800.000	3	dokumen	10.350.000	3	dokumen	10.208.572	12	dokumen	39.543.872	100,00	99,96					Dinsos PPKB PPPA			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	4	dokumen	1	dokumen	106.773.197	4	dokumen	84.741.900	1	dokumen	28.503.780	1	dokumen	16.308.240	1	dokumen	16.308.240	1	dokumen	23.582.118	4	dokumen	84.702.378	100,00	99,95					Dinsos PPKB PPPA			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	dokumen	106.773.197	4	dokumen	84.741.900	1	dokumen	28.503.780	1	dokumen	16.308.240	1	dokumen	16.308.240	1	dokumen	23.582.118	4	dokumen	84.702.378	100,00	99,95					Dinsos PPKB PPPA			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	10,1	%	17	%	411.544.919	11	%	430.112.623	11,17	%	42.000.000	2,5	%	94.501.170	2,7	%	116.790.000		%	144.374.518	11,17	%	397.665.688	100,00	92,46					Dinsos PPKB PPPA			
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	163	orang	247	orang	411.544.919	171	Orang	430.112.623	91	orang	42.000.000	97	orang	94.501.170	106	orang	116.790.000	114	orang	144.374.518	171	orang	397.665.688	100,00	92,46					Dinsos PPKB PPPA			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			185	orang	52.107.680	50	Orang	57.558.188	0	orang	0	40	orang	9.525.700	45	orang	27.290.000	50	orang	20.249.972	50	orang	57.065.672	100,00	99,14					Dinsos PPKB PPPA			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			21	orang	299.728.439	21	Orang	297.553.281	21	orang	42.000.000	21	orang	68.835.470	19	orang	65.382.000	19	orang	90.102.594	21	orang	266.320.064	100,00	89,50					Dinsos PPKB PPPA			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			43	lembaga	59.708.800	42	Lembaga	75.001.154	35	lembaga	0	36	lembaga	16.140.000	42	lembaga	24.118.000	49	lembaga	34.021.952	42	lembaga	74.279.952	100,00	99,04					Dinsos PPKB PPPA			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **	100	%	100	%	1.775.013.663	100	%	2.789.555.492	100	%	50.256.482	100	%	822.885.152	100	%	412.211.340	24,011	%	357.987.875	100	%	1.643.340.849	100,00	58,91					Dinsos PPKB PPPA			
			Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	0,05	%	0,05	%		0,05	%		0,01	%	0	0,02	%	0	0,01	%	0	0,01	%	0	0,05	%	100,00										
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1425	orang	2.636	orang	1.647.319.713	1441	Orang	2.362.216.328	245	orang	28.362.360	364	orang	788.068.860	465	orang	97.564.220	346	orang	318.558.703	1420	orang	1.232.554.143	98,54	52,18					Dinsos PPKB PPPA			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab																											
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%																													
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																												
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			150	orang	188.560.986	35	Orang	159.764.558	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	145.427.020	35	orang	145.427.020	100,00	91,03					Dinsos PPKB PPPA																							
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			43	orang	11.594.700	30	Orang	6.900.229	3	orang	0	11	orang	0	9	orang	2.749.400	11	orang	3.964.294	34	orang	6.713.694	100,00	97,30			Dinsos PPKB PPPA																						
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			1.654	orang	1.172.825.800	741	Orang	1.958.632.000	60	orang	3.900.000	101	orang	731.742.000	232	orang	31.329.000	234	orang	78.180.500	627	orang	845.151.500	84,62	43,15			Dinsos PPKB PPPA																						
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			320	orang	90.303.962	165	Orang	50.112.236	38	orang	0	12	orang	9.549.200	36	orang	10.350.000	37	orang	29.662.480	123	orang	49.561.680	74,55	98,90			Dinsos PPKB PPPA																						
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			125	orang	169.199.990	300	Orang	179.906.786	135	orang	24.462.360	105	orang	46.777.660	130	orang	51.715.820	5	orang	56.090.576	375	orang	179.046.416	100,00	99,52			Dinsos PPKB PPPA																						
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			89	orang	14.834.275	40	Orang	6.900.519	5	orang	0	0	orang	0	32	orang	1.420.000	11	orang	5.233.833	48	orang	6.653.833	100,00	96,43			Dinsos PPKB PPPA																						
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar/ Anak Terlantar/ Lanjut usia terlantar/ Gelandangan dan Pengemis/ dan PMKS lainnya di luar pantil yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah	75	orang	82	orang	127.693.950	80	Orang	427.339.164	26	orang	21.894.122	17	orang	34.816.292	25	orang	314.647.120	27	orang	39.429.172	95	orang	410.786.706	100,00	96,13			Dinsos PPKB PPPA																						
		Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			82	orang	87.295.570	80	Orang	102.243.530	26	orang	16.387.022	17	orang	27.709.320	25	orang	16.519.120	27	orang	27.605.002	95	orang	88.220.464	100,00	86,28			Dinsos PPKB PPPA																						
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			82	orang	20.408.050	80	Orang	14.963.947	24	orang	1.977.900	16	orang	4.149.332	19	orang	0	22	orang	8.827.446	81	orang	14.954.678	100,00	99,94			Dinsos PPKB PPPA																						
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota			63	orang	19.990.330	70	Orang	310.131.687	22	orang	3.529.200	14	orang	2.957.640	19	orang	298.128.000	24	orang	2.996.724	79	orang	307.611.564	100,00	99,19			Dinsos PPKB PPPA																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																					
Predikat kinerja																																																					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	57,59	%	95	%	8.867.635.286	89,9	%	8.899.443.668	79,90	%	80.165.244	79,90	%	228.447.852	79,9	%	294.324.171	91	%	8.055.567.655	91,00	%	8.658.504.922	100,00	97,29			Dinsos PPKB PPPA																						
		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpelihara	25	anak	79.351.505	25	Orang	60.780.957	2	anak	0	4	anak	9.510.267	9	anak	0	41	anak	51.029.628	56	anak	60.539.895	100,00	99,60			Dinsos PPKB PPPA																								
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25	orang	79.351.505	25	Orang	60.780.957	2	orang	0	4	orang	9.510.267	9	orang	0	41	orang	51.029.628	56	orang	60.539.895	100,00	99,60			Dinsos PPKB PPPA																								
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang tertangani	73262	orang	528.578	orang	8.788.283.781	852813	Orang	8.838.662.711	769.727	orang	80.165.244	769.727	orang	218.937.585	661.234	orang	294.324.171	852.813	orang	8.004.538.027	852.813	orang	8.597.965.027	100,00	97,28			Dinsos PPKB PPPA																						
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	769.854	orang	430.936.391	852813	Orang	397.005.240	769.727	orang	61.197.004	769.727	orang	131.444.296	661.234	orang	181.846.140	852.813	orang	15.518.233	852.813	orang	390.005.673	100,00	98,24			Dinsos PPKB PPPA																								
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	66.351	orang	774.104.172	72160	Keluarga	404.685.990	65.415	orang	18.968.240	65.415	orang	86.883.289	65.415	orang	63.117.240	72.160	orang	230.738.528	72.160	orang	399.707.297	100,00	98,77			Dinsos PPKB PPPA																								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab										
										I		II		III		IV																				
										8		9		10		11											12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota			205.986	keluarga	7.507.322.300	140000	Keluarga	7.965.643.026	126.355	keluarga	0	126.355	keluarga	610.000	125.487	keluarga	27.020.511	258.022	keluarga	7.719.474.393	258.022	keluarga	7.747.104.904	100,00	97,26					Dinsos PPKB PPPA			
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota			550	orang	75.920.918	100	Orang	71.328.455	0	orang	0	100	orang	0	380	orang	22.340.280	100	orang	38.806.873	580	orang	61.147.153	100,00	85,73					Dinsos PPKB PPPA			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				
Predikat kinerja																																				
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	%	100	%	561.015.770	100	%	471.457.189	100	%	10.851.800	100	%	119.784.344	100	%	67.291.517	100	%	271.091.950	100	%	469.019.611	100,00	99,48						Dinsos PPKB PPPA		
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	75	KK	462	orang	482.559.980	350	Orang	400.871.729	216	orang	10.851.800	167	orang	87.296.544	55	orang	67.291.517	42	orang	233.213.402	480	orang	398.653.263	100,00	99,45						Dinsos PPKB PPPA		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			462	orang	167.789.800	350	Orang	135.410.660	216	orang	10.851.800	167	orang	68.811.840	55	orang	18.052.900	42	orang	37.658.730	480	orang	135.375.270	100,00	99,97						Dinsos PPKB PPPA		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota			150	orang	71.904.660	100	Orang	70.880.714	17	orang	0	0	orang	12.558.066	20	orang	0	63	orang	58.309.144	100	orang	70.867.210	100,00	99,98						Dinsos PPKB PPPA		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	40	lokasi	12	lokasi	87.742.365	39	unit	83.034.625	0	lokasi	0	0	lokasi	0	0	lokasi	0	90	jiwa	82.697.536	90	jiwa	82.697.536	100,00	99,59						Dinsos PPKB PPPA		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			150	orang	67.214.970	75	orang	61.459.770	3	orang	0	50	orang	5.926.638	22	orang	28.875.850	75	orang	26.643.434	150	orang	61.445.922	100,00	99,98						Dinsos PPKB PPPA		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			395	orang	87.908.185	50	orang	50.085.960	0	orang	0	0	orang	0	100	orang	20.362.767	170	orang	27.904.558	270	orang	48.267.325	100,00	96,37						Dinsos PPKB PPPA		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	78.455.790	1 kali	70.585.460	0 kali	0	1 kali	32.487.800	0 kali	0	0 kali	37.878.548	1 kali	70.366.348	100,00	99,69					Dinsos PPKB PPPA		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota		40 orang	78.455.790	50 orang	70.585.460	0 orang	0	50 orang	32.487.800	0 orang	0	220 orang	37.878.548	270 orang	70.366.348	100,00	99,69					Dinsos PPKB PPPA		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	99,48							
Predikat kinerja																				Sangat tinggi	Sangat tinggi						
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PROGRAM PENDARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melaksanakan PUG	5,7 %	5,75 %	265.039.882	5,7 %	150.272.550	5,2 %	7.596.668	5,5 %	15.242.784	5,5 %	16.849.293	5,7 %	98.550.000	5,7 %	138.238.745	100,00	91,99					Dinsos PPKB PPPA		
			Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya	14,62 %	37,34 %		14,62 %		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14,62 %	14,62 %		14,62 %		100,00								
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG	14 lembaga	14 Lembaga	123.682.879	10 Lembaga	44.865.865	0 Lembaga	2.349.968	10 Lembaga	2.520.000	10 Lembaga	4.799.293	10 Lembaga	32.750.000	10 Lembaga	42.419.261	100,00	94,55					Dinsos PPKB PPPA		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG)	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	10 Perangat Daerah	10 Perangat Daerah	123.682.879	10 Perangat Daerah	44.865.865	0 Perangat Daerah	2.349.968	10 Perangat Daerah	2.520.000	10 Perangat Daerah	4.799.293	10 Perangat Daerah	32.750.000	10 Perangat Daerah	42.419.261	100,00	94,55					Dinsos PPKB PPPA		
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang terlibat dalam bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	550 orang	550 orang	48.157.520	500 orang	58.612.620	0 orang	1.692.584	500 orang	2.532.784	500 orang	12.050.000	500 orang	37.550.000	500 orang	53.825.368	100,00	91,83					Dinsos PPKB PPPA		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota		1 organisasi	48.157.520	1 Organisasi	58.612.620	0 organisasi	1.692.584	1 organisasi	2.532.784	1 organisasi	12.050.000	1 organisasi	37.550.000	1 organisasi	53.825.368	100,00	91,83					Dinsos PPKB PPPA		
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi perempuan yang dibina	20 organisasi	20 organisasi	93.199.483	19 Organisasi	46.794.065	0 organisasi	3.554.116	19 organisasi	10.190.000	19 organisasi	0	19 organisasi	28.250.000	19 organisasi	41.994.116	100,00	89,74					Dinsos PPKB PPPA		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 organisasi	1 dokumen	93.199.483	1 Dokumen	46.794.065	0 dokumen	3.554.116	1 dokumen	10.190.000	0 dokumen	0	0 dokumen	28.250.000	1 dokumen	41.994.116	100,00	89,74					Dinsos PPKB PPPA		



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Laku (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha			25 organisasi	295.238.351	25 organisasi	212.221.460	2 organisasi	18.649.916	25 organisasi	35.343.141	25 organisasi	27.525.000	25 organisasi	111.179.162	25,00 organisasi	192.697.219	100,00	90,80					Dinsos PPKB PPPA	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	90,80						
Predikat kinerja																					Sangat tinggi	Sangat tinggi					
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart	100 %		100 %	260.269.982	100 %	272.801.623	100 %	14.040.611	100 %	25.181.984	100 %	61.085.272	100 %	92.074.695	100 %	192.382.562	100,00	70,52					Dinsos PPKB PPPA	
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 layanan		3 layanan	260.269.982	3 layanan	187.817.623	3 layanan	13.240.611	3 layanan	17.561.984	3 layanan	38.845.272	3 layanan	51.744.606	3 layanan	121.392.473	100,00	64,63					Dinsos PPKB PPPA	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			3 layanan	260.269.982	3 layanan	187.817.623	3 layanan	13.240.611	3 layanan	17.561.984	3 layanan	38.845.272	3 layanan	51.744.606	3 layanan	121.392.473	100,00	64,63					Dinsos PPKB PPPA	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak					8 Lembaga	50.750.000	8 Lembaga	800.000	8 Lembaga	7.620.000	8 Lembaga	22.240.000	8 Lembaga	7.680.000	8 Lembaga	38.340.000	100,00	75,55						
		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program /Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					30 Orang	50.750.000	30 orang	800.000	30 orang	7.620.000	30 orang	22.240.000	30 orang	7.680.000	30 orang	38.340.000	100,00	75,55						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan khusus anak yang mendapatkan penguatan					2 Lembaga	34.234.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	2 Lembaga	32.650.089	2 Lembaga	32.650.089	100,00	95,37						
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK					30 Orang	34.234.000	0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	0	30 Orang	32.650.089	30 Orang	32.650.089	100,00	95,37						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	70,52						
Predikat kinerja																				Sangat tinggi	Sedang						
3	Meningkatnya kualitas penggunaan keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Usia Kawin Pertama (UKP)*	22 tahun		23 tahun	610.104.357	22,79 Tahun	655.523.158	22,4 tahun	35.812.020	22,4 tahun	120.089.878	22,7 tahun	105.866.680	22,7 tahun	389.577.532	22,7 tahun	651.346.110	99,61	99,36					Dinsos PPKB PPPA	
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usia Perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) minimal 20 tahun*	120088 PUS		716.216 PUS	610.104.357	120100 PUS	655.523.158	182.246 PUS	35.812.020	120.150 PUS	120.089.878	203.519 PUS	105.866.680	203.820 PUS	389.577.532	203.519 PUS	651.346.110	100,00	99,36					Dinsos PPKB PPPA	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			1 Laporan	59.955.123	2 Laporan	60.000.000	1 Laporan		0	1 Laporan	14.642.162	0 Laporan	27.802.744	2 Laporan	17.164.000	2 Laporan	59.608.906	100,00	99,35					Dinsos PPKB PPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab														
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			16													
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.												
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			1 dokumen	129.535.704	1	Dokumen	108.169.916	1	dokumen	13.485.120	1	dokumen	17.200.000	1	dokumen	38.429.464	1	dokumen	38.835.100	1	dokumen	107.949.684	100,00	99,80							Dinsos PPKB PPPA						
		Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			184 Laporan	294.700.000	184	Laporan	218.400.000	90	Laporan	6.450.000	10	Laporan	33.920.000	4	Laporan	0	80	Laporan	177.549.832	184	Laporan	217.919.832	100,00	99,78							Dinsos PPKB PPPA						
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			1 dokumen	85.991.360	1	Dokumen	239.400.000	1	dokumen	14.646.900	1	dokumen	50.677.716	1	dokumen	36.919.400	1	dokumen	134.305.900	1	dokumen	236.549.916	100,00	98,81							Dinsos PPKB PPPA						
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			1 dokumen	39.922.170	1	Dokumen	29.553.242	1	dokumen	1.230.000	1	dokumen	3.650.000	1	dokumen	2.715.072	1	dokumen	21.722.700	1	dokumen	29.317.772	100,00	99,20							Dinsos PPKB PPPA						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (Unmet Need)			12,42 %		10,75 %		11.134.443.088	12,32 %		11.365.611.687	10 %		721.952.614	9,63 %		1.765.963.014	08,36 %		2.351.389.293	8,07 %		6.348.113.829	9,63 %		11.187.418.750	100,00		98,43			Dinsos PPKB PPPA						
			Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)			72,1 %		74,21 %			72,1 %		74,55 %				75,11 %			76,6 %			77,16 %			75,11 %			100,00											
			Persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			25 %		85,71 %			25 %		85,71 %				85,71 %			85,71 %			%		85,71 %			100,00												
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi KIE Program Bangga Kencana			50 kali		50 kali		1.876.430.173	50 kali		1.674.443.200	12 kali		103.445.114	50 kali		353.611.856	50 kali		360.991.575	50 kali		845.634.763	50 kali		1.663.683.308	100,00		99,36			Dinsos PPKB PPPA						
		Pengendalian Program KKBPB	Jumlah laporan pengendalian Program KKBPB			21 laporan		79.960.000																																
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			5 laporan		1.020.112.876	21		Laporan		983.300.000	4		laporan		98.845.114	21		laporan		114.812.746	21		laporan		564.727.763	21		laporan		973.684.898	100,00		99,02		Dinsos PPKB PPPA		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			4 laporan		314960000	21		Laporan		420.000.000	21		laporan		0	21		laporan		145.550.000	21		laporan		187.200.000	21		laporan		420.000.000	100,00		100,00		Dinsos PPKB PPPA		
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			5 dokumen		149670900	4		Dokumen		125.000.000	1		dokumen		0	2		dokumen		52.900.000	0		1		dokumen		71.449.300	1		dokumen		124.349.300	100,00		99,48		Dinsos PPKB PPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penang gung Jawab									
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5x100%								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.							
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			1 dokumen	61793287	4	Dokumen	11.501.200	1	dokumen	4.600.000	2	dokumen	2.599.110	0	dokumen	2.050.000	1	dokumen	2.160.000	4	dokumen	11.409.110	100,00	99,20					Dinsos PPKB PPPA	
		Advokasi Program Bangga Kencana oleh tokoh advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			25 organisasi	249.933.110	25	Organisasi	134.642.000	25	orgaisasi	0	25	orgaisasi	37.750.000	25	orgaisasi	4.943.000	25	orgaisasi	91.547.000	25	orgaisasi	134.240.000	100,00	99,70					Dinsos PPKB PPPA	
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang diberdayakan			422 orang	1.116.000.000	415	orang	3.038.736.000	415	orang	275.210.000	415	orang	432.955.758	415	orang	924.871.268	415	orang	1.380.762.518	415	orang	3.013.799.544	100,00	99,18					Dinsos PPKB PPPA	
		Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)			372 orang	1.116.000.000	372	orang	2.683.200.000	372	orang	275.210.000	372	orang	432.955.758	372	orang	905.779.268	372	orang	1.062.353.318	372	orang	2.676.298.344	100,00	99,74					Dinsos PPKB PPPA	
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas KB/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			628.667 PUS		1	Laporan	355.536.000	0	Laporan	0	1	Laporan	0	0	Laporan	19.092.000	1	Laporan	318.409.200	1	Laporan	337.501.200	100,00	94,93						
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				148200 PUS		1	laporan	6.627.899.220	148.200	PUS	4.429.896.487	197.000	PUS	255.847.500	147.345	PUS	816.045.400	154.603	PUS	702.726.450	196.064	PUS	2.516.785.600	154.603	PUS	4.291.404.950	100,00	96,87			Dinsos PPKB PPPA
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			221.233 orang	447.317.701	62	Laporan	45.473.000	15	laporan	12.447.500	62	laporan	5.596.500	62	laporan	7.939.900	62	laporan	19.380.100	62	laporan	45.364.000	100,00	99,76					Dinsos PPKB PPPA	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			30 unit	3.516.967.909	10.331	orang	4.347.723.487	1.750	orang	235.660.000	2047	orang	801.828.900	2.579	orang	680.111.550	3.820	orang	2.491.740.500	10.196	orang	4.209.340.950	98,69	96,82					Dinsos PPKB PPPA	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB			30 unit	2.629.563.110																										
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			4 laporan	34.050.500	4	laporan	36.700.000	1	laporan	7.740.000	2	laporan	8.620.000	0	laporan	14.675.000	1	laporan	5.665.000	4	laporan	36.700.000	100,00	100,00					Dinsos PPKB PPPA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab																												
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%																														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																													
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	12	unit	10	unit	1.514.113.695	12	Lembaga	2.222.536.000	0	lembaga	87.450.000	6	lembaga	163.350.000	1	lembaga	362.800.000	5	lembaga	1.604.930.948	12	lembaga	2.218.530.948	100,0	99,82					Dinsos PPKB PPPA																					
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB			2	dokumen	3.750.000																																														
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB			372	kampung	1.510.363.695	372	kampung	622.336.000	372	kampung	87.450.000	372	kampung	163.350.000	372	kampung	362.800.000	372	kampung	5.035.948	372	kampung	618.635.948	100,00	99,41					Dinsos PPKB PPPA																					
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB			372	Unit	1.600.200.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	372	Unit	1.599.895.000	372	Unit	1.599.895.000	100,00	99,98																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																						
Predikat kinerja																																																						
Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga		62,29	%	62	%	6.904.889.211	62,29	%	6.870.404.900	54,95	%	570.570.000	54,95	%	1.184.606.500	60,93	%	1.193.939.544	86,6	%	3.899.455.588	86,60	%	6.848.571.632	100,00	99,68						Dinsos PPKB PPPA																				
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Poktan yang dibina dan dievaluasi Program Pembangunan Ketahanan Keluarga		84	kelompok	84	kelompok	598.589.211	84	kelompok	263.804.900	84	kelompok	0	84	kelompok	43.466.500	84	kelompok	52.799.544	84	kelompok	161.121.404	84	kelompok	257.387.448	100,00	97,57						Dinsos PPKB PPPA																				
	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				12	laporan	90.001.800																																														
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))				5	laporan	210.507.411	5	laporan	120.804.900	2	laporan	0	1	laporan	43.466.500	1	laporan	52.799.544	1	laporan	18.341.400	5	laporan	114.607.444	100,00	94,87						Dinsos PPKB PPPA																				
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)) yang tersedia				25	unit	298.080.000	11	unit	143.000.000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	11	unit	142.780.004	11	unit	142.780.004	100,00	99,85						Dinsos PPKB PPPA																				
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				12	kali	6.306.300.000	12	Kali	6.606.600.000	6	Kali	570.570.000	4	Kali	1.141.140.000	1	Kali	1.141.140.000	1	Kali	3.738.334.184	12	Kali	6.591.184.184	100,00	99,77						Dinsos PPKB PPPA																				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penang gung Jawab			
								I		II		III		IV													
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			12 laporan	3.003.000.000	12 laporan	3.003.000.000	3 laporan	210.210.000	3 laporan	420.420.000	3 laporan	420.420.000	3 laporan	1.936.534.184	12 laporan	2.987.584.184	100,00	99,49					Dinsos PPKB PPPA	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			12 laporan	3.303.300.000	12 laporan	3.603.600.000	3 laporan	360.360.000	3 laporan	720.720.000	3 laporan	720.720.000	3 laporan	1.801.800.000	12 laporan	3.603.600.000	100,00	100,00					Dinsos PPKB PPPA	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	99,68						
Predikat kinerja																					Sangat tinggi	Sangat tinggi					
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							38.429.854.005		40.127.975.827				3.356.034.725		6.399.427.987		6.452.657.281		21.746.446.639			37.954.566.632					
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																					99,70	94,58					
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																					Sangat tinggi	Sangat tinggi					

Disusun  
Kota Mungkid, 05 Januari 2026  
KEPALA DIN SOS PPKB PPPA  
KABUPATEN MAGELANG



BE LA PIN ARSI, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670120 198703 2 001

Dievaluasi  
Kota Mungkid, 2026  
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA  
KABUPATEN MAGELANG

M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800730 199810 1 001

FORM B. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH DINSOS PPKB PPPA KAB. MAGELANG  
TAHUN 2025

KODE	URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2025		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	BIDANG URUSAN SOSIAL							
1.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	Sangat tinggi	7.762.720.101	7.762.720.101	7.423.796.802,00	95,63	Sangat tinggi
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, OPD, dan keuangan Perangkat Daerah	100,00						
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100,00						
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100,00	Sangat tinggi	430.112.623	430.112.623	397.665.688,00	92,46	Sangat tinggi
	Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	100,00						
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	96,48	Sangat tinggi	2.789.555.492	2.789.555.492	1.643.340.849,00	58,91	Rendah
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00						
	Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	100,00						
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100,00	Sangat tinggi	8.899.443.668	8.899.443.668	8.658.504.922,00	97,29	Sangat tinggi
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100,00						
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100,00	Sangat tinggi	471.457.189	471.457.189	469.019.611,00	99,48	Sangat tinggi
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	100,00						
	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100,00	Sangat tinggi	150.272.550	150.272.550	138.238.745,00	91,99	Sangat tinggi
	Persentase lembaga yang melaksanakan PUG	100,00						
	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya	100,00						
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100,00	Sangat tinggi	247.851.376	247.851.376	151.583.742,00	61,16	Rendah

KODE	URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2025		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100,00						
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100,00	Sangat tinggi	212.221.460	212.221.460	192.697.219,00	90,80	Sangat tinggi
	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart	100,00						
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100,00	Sangat tinggi	272.801.623	272.801.623	192.382.562,00	70,52	Sedang
	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart	100,00						
	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	99,94	Sangat tinggi	655.523.158	655.523.158	651.346.110,00	99,36	Sangat tinggi
	Usia Kawin Pertama (UKP)	99,61						
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	99,93	Sangat tinggi	11.365.611.687	11.365.611.687	11.187.418.750,00	98,43	Sangat tinggi
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (Unmet Need)	100,00						
	Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (MCPR)	100,00						
	Persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	100,00						
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100,00	Sangat tinggi	6.870.404.900	6.870.404.900	6.848.571.632,00	99,68	Sangat tinggi
	Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga	100,00						
	<b>TOTAL RATA-RATA</b>	<b>99,70</b>	<b>Sangat tinggi</b>	<b>40.127.975.827</b>	<b>40.127.975.827</b>	<b>37.954.566.632</b>	<b>94,58</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Kota Mungkid. 05 Januari 2026

Kepala Dinsos PPKB PPPA  
Kabupaten Magelang



Bela Harsi, SH, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670120 198703 2 001

FORM C. EVALUASI REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025  
PERANGKAT DAERAH: DINSOS PPKB PPPA

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari urusan Sosial, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program sejumlah 12 Program, adalah sebagai berikut:

- 12 (dua belas) program masuk dalam predikat kinerja sangat tinggi
- Tidak ada program masuk dalam predikat kinerja tinggi
- Tidak ada program masuk dalam predikat kinerja sedang
- Tidak ada program masuk dalam predikat kinerja rendah
- Tidak ada program masuk dalam predikat kinerja sangat rendah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang terhadap tingkat capaian renstra masuk dalam predikat kinerja **sangat tinggi** dengan nilai **99,70%**. Nilai tersebut adalah capaian masuk dalam periode tahun pertama dalam implementasi Renstra 2025-2026.

Faktor pendorong capaian kinerja adalah:

1. Telah tersusun rencana kerja pada setiap kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan.
2. Komitmen bersama pegawai Dinsos PPKB PPPA untuk merealisasikan anggaran dan kinerja sesuai dengan target yang telah disepakati.
3. Koordinasi lintas sektor yang cukup kuat.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah:

1. Adanya Sub kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOKB yang harus dilakukan penyesuaian dengan Juknis DAK yang baru terbit saat tahun berjalan. Penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan dengan penggeseran anggaran, akan tetapi harus dilakukan melalui perubahan anggaran. Sehingga waktu penyelesaian kegiatan menjadi sangat mundur dari jadwal yang telah disusun sebelumnya.
2. Dalam kegiatan pemberian bansos, atas dasar verifikasi ulang terhadap calon penerima bansos, sebagian calon penerima yang tidak bisa dicairkan bansos berupa uang dikarenakan tidak masuk dalam kategori

desil 1 dan 2 DTSEN, tidak tinggal di desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrim, sudah menerima bansos lain, dan sudah meninggal dunia. Sehingga kegiatan penyaluran bansos tidak bisa dilaksanakan secara optimal.